BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki wilayah yang besar dan penduduk yang padat. Untuk mengatur dan menjalankan sebuah pemerintahan yang mengatur negara ini dengan penduduk yang cukup padat, pastilah dibutuhkan sejumlah dana yang besar. Sehingga pemerintah perlu mendapatkan pemasukan dana (penerimaan negara). Menurut Wjiraharjo sumber-sumber penerimaan atau penghasilan negara itu adalah:

1. Perusahaan-perusahaan negara.

Penghasilan dari perusahaan negara yang di ambil dengan tarif secara wajar. Misalnya pada perusahaan listrik atau jasa angkutan umum.

2. Barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai oleh pemerintah.

Hubungannya dengan tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah yang diusahakan untuk mendapatkan penghasilan.

3. Denda-denda dan perampasan untuk kepentingan umum.

4. Hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar.

Jika terhadap suatu hak waris atau harta peninggalan lainnya, tidak ada orang yang menyatakan diri berhak atas hak tersebut, atau jika semua ahli waris menolak hak waris yang bersangkutan maka di Indonesia menurut pasal 1126 kitab undang-undang hukum sipil harta peninggalan ini dianggap terlantar. Dan balai harta peninggalan wajib mengurus dan mengumumkannya. Jika selama 3

tahun masih belum ada ahli waris yang muncul maka Balai Harta Peninggalan (BHP) wajib mengurusnya.

5. Hibah wasiat dan hibah lainnya.

Berupa sumbangan dari Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB).

6. Pajak, retribusi dan sumbangan.

Dan pajak merupakan pemberi kontribusi paling besar bagi penerimaan negara. Di Indonesia Pemerintah membagi pajak menjadi dua berdasarkan wewenang yang memungut atau lembaga pemungutnya agar penerimaan pajak dapat merata yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

Pajak Negara atau Pusat terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai. Sedangkan pajak Daerah terdiri dari 5 Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) dan 11 jenis Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), meliputi :

1. Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
2. Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Setiap daerah di Indonesia memiliki dinas pendapatan yang berwenang menarik semua pajak daerah dari setiap objek pajak. Hal ini sama dengan kota Bandung yang memiliki Dinas Pendapatan Daerah yang mengatur pemungutan pajak.

Kota Bandung semakin berkembang menjadi kota besar dengan pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran semakin banyak sehingga bisnis parkir pun ikut berkembang guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya, bahkan di hampir setiap tempat dibutuhkan sebuah lahan parkir yang dikelola oleh swasta atau pun pemerintah. Maka kemungkinan besar pemasukan kota Bandung yang di dapat dari pajak parkir pun terus meningkat dari waktu ke waktu, tentunya akan mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan hasil uraian di atas peneliti tertarik untuk membahas lebih jauh tentang pajak parkir dan ingin mengetahui seperti apa pengaruhnya terhadap penerimaan pajak daerah kota Bandung. Sehingga penulis mengambil judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung: Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pemungutan dan perhitungan pajak parkir dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung.
2. Berapa besar kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.

3. Bagaimana pengaruhPenerimaan Pajak ParkirterhadapPenerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian adalah tindak lanjut dari identifikasi masalah yang dijabarkan diatas, yaitu untuk :

1. Mengetahui sistem pemungutan dan perhitungan Pajak Parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung.
2. Mengetahui besarnya kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.
3. Mengetahui pengaruhPenerimaan Pajak Parkir terhadapPenerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan diadakanya penelitian ini diharapkan hasilnya akan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait, yaitu :

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan pengetahuan mengenai pajak daerah khususnya pajak parkir.

2. Bagi rekan-rekan mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para mahasiswa yang ingin melakukan penelitian mengenai pajak daerah khususnya mengenai pajak parkir.

3. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan bahan evaluasi mengenai besarnya kontribusi penerimaan Pajak Parkir dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak daerah kota Bandung.